

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori yang mendasari penelitian ini adalah *stewardship theory* yang merupakan bagian dari teori agensi. Menurut Donaldson dan Davis, (1991) dalam Anton, (2010) *stewardship* menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Teori *stewardship* juga merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Sanjaya, 2017).

Teori *stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yaitu pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas *principals* dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan profit lainnya (Wahida, 2015).

Awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *steward* dengan *principals*. Akuntansi merupakan alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, ada spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principals* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Secara prinsip akuntansi adalah alat pengendalian keuangan, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan.

Implikasi teori *steward* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi pihak publik, dan mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* (manajer dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Wahida, 2015).

Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Pemerintah daerah harus melaporkan secara jelas dan terperinci terkait dengan data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang

dibuat oleh pemerintah daerah bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan laporan keuangan guna untuk pengambilan keputusan (Wahida, 2015).

2.1.2 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Sedangkan menurut Bastian (2010, h.9) laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Mahmudi (2011, h.143) laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yaitu suatu proses akuntansi yang berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dalam suatu periode akuntansi, laporan keuangan harus berdasarkan standar

standar akuntansi yang berlaku dan berguna bagi pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.1.3.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Madiasmo (2004) menyatakan bahwa tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah untuk :

1. Memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban. (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintahan.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dalam memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Kesimpulan dari tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan dan menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan atau pengambilan keputusan dan berguna untuk kelangsungan suatu entitas atau suatu pemerintah daerah.

2.1.3.3 Komponen laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Bastian (2010) komponen laporan keuangan sektor publik adalah :

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca atau laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva uatng dan modal pemilik

selama satu periode tertentu. Laporan keuangan harus memasukan pos-pos sebagai berikut :

- a) Properti, publik dan peralatan
- b) Aktiva tidak berwujud
- c) Aktiva keuangan (selain poin d, f dan h)
- d) Investasi yang diperlukan dengan metode ekuitas
- e) Persediaan
- f) Pemulihan transaksi non pengukuran, termasuk pajak dan transfer
- g) Piutang dari transaksi pertukaran
- h) Kas dan setara kas
- i) Utang pajak dan transfer
- j) Utang karena transaksi penukaran
- k) Cadangan (provision)
- l) Kewajiban tidak lancar
- m) Partisipasi minoritas
- n) Aktiva/ekuitas netto

2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit)

Laporan kinerja keuangan atau disebut juga dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan surplus-rugi, laporan operasi, laporan surplus-defisit atau laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut ini:

- a) Pendapatan dari aktivitas operasi
- b) Surplus atau defisit dari aktivitas operasi
- c) Biaya keuangan (biaya pinjaman)
- d) Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas
- e) Surplus atau defisit dari aktivitas biasa
- f) Pos-pos luar biasa
- g) Saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto
- h) Surplus atau defisit neto untuk periode

3. Laporan Perubahan Aktiva (Ekuitas Neto)

Laporan perubahan aktiva (ekuitas neto) menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam suatu laporan keuangan. Perubahan ekuitas neto secara keseluruhan menyajikan total surplus/defisit neto selama satu periode. Pendapatan dan biaya lainnya diakui secara langsung sebagai perubahan aktiva/ekuitas neto dari setiap kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan aktiva ekuitas neto meliputi sebagai berikut :

- a) Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik

- b) Saldo akumulasi surplus dan defisit pada awal periode, pada tanggal pelaporan dan pergerakan selama periode.
- c) Pengungkapan komponen asset/ekuitas neto secara terpisah dan rekonsiliasi antara nilai tercatat setiap komponen asset/ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan, dan kegiatan investasi, informasi arus kas sangat bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar estimasi, kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan Sektor Publik

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih ini menyajikan semua informasi kenaikan ataupun penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca merupakan gambaran posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperbaiki, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa baik masyarakat umum sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b) Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya

yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan, laporan operasional terdiri dari :

a) Pendapatan Laba Operasional (LO)

Pendapatan laba operasional (LO) merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih suatu pemerintahan.

b) Beban

Beban merupakan suatu kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

c) Transfer

Transfer merupakan penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan dari atau oleh entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d) Pos-Pos Luar Biasa

Pos-pos luar biasa berupa pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi uang bukan dari operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama periode tertentu. Laporan arus kas terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas,

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau perincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, Laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan diannjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan

serta ungkapan-ungkapan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dari beberapa pendapat tentang komponen laporan keuangan di atas, dapat disampaikan tentang komponen laporan keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang lebih terhadap komponen-komponen laporan keuangan ini sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Laporan keuangan dibuat menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, oleh karena itu memahami tujuan dan manfaat setiap komponen-komponen laporan keuangan sektor publik sangat penting untuk dilakukan.

2.1.3.4 Kualitas Laporan Keuangan.

Definisi kualitas menurut Mulyana, (2010) dalam Susilawati dan Riana, (2014) kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh pemakai informasi. Menurut Defitri (2016) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai laporan keuangan.

Dari *definisi* di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan dimasa yang akan datang serta dapat juga dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya.

2.1.3.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah pengawasan *intern*. Pengawasan *intern* merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian *intern* yang berfungsi melakukan penilaian

independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi pemerintah (Djalil, 2014).

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemahaman tentang peraturan. Peraturan yang dimaksud adalah pendoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan peraturan tentang akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi.

Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*) dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi

Sektor Publik, 2006). Sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif ditengah persaingan yang semakin ketat ini. Dengan kemajuan teknologi pada saat ini, instansi-instansi pemerintah sudah mulai meninggalkan sistem manual, beralih ke sistem komputer. Namun yang menjadi kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor penggunaan teknologi informasi di instansi pemerintahan belum optimal.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Komitmen dari Pemerintah Daerah dalam hal ini merupakan keinginan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan perubahan sesuai dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Adanya komitmen organisasi

akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal tersebut berdampak pada semakin baiknya kualitas dari informasi laporan keuangan. Pernyataan ini mendukung hasil penelitian Suwanda (2015), yaitu komitmen organisasi secara signifikan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.1.3.6 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Informasi yang relevan :

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang membelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat

diverifikasi. Informasi yang mungkin relevan, tetapi jika hakikat dan penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a) Penyajian jujur

Informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak sepihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama . apabila entitas pemerintahan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Agar informasi yang disajikan dapat dibandingkan maka penyajian laporan keuangan minimal harus disajikan dalam 2 (dua) priode atau 2 (dua) tahun anggaran.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan digunakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi Manajemen

2.1.3.1 Definisi Sistem

Sistem dalam suatu institusi pemerintahan sangatlah penting , karena sistem sangatlah menunjang terhadap kinerja perusahaan atau institusi pemerintah, baik yang berskala kecil maupun besar. Suatu sistem dapat berjalan dengan baik diperlukan kerjasama diantara unsur-unsur yang terkait dalam

sistem tersebut. Penjelasan di atas menjelaskan bahwa sistem bekerja dalam suatu jaringan dari suatu prosedur yang saling berhubungan satu sama lain, untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga dapat didefinisikan oleh para ahli dalam berbagai cara yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan cara pandang dan lingkup sistem dituju. Secara umum sistem informasi didefinisikan sebagai sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang asling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai suatu tujuan (Sutanta, 2003, h.4).

2.1.3.2 Definisi Informasi

Informasi merupakan data yang telah diproses sehingga mempunyai arti tertentu bagi penerimanya. Sumber dari informasi adalah data, sedangkan data itu sendiri adalah kejadian, sedangkan kejadian merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, dalam hal ini data dan informasi saling berkaitan. Pengertian informasi adalah hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga secara tidak langsung pada saat mendatang (Sutanta, 2003, h.10).

2.1.3.3 Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen dapat didefinisikan sebagai kumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul, bekerja bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (*input*) berupa data-data, kemudian mengolahnya (*processing*), dan menghasilkan keluaran (*output*) berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun di masa mendatang, mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategi organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan (Sutanta, 2003, h.19)

2.1.3.4 Pengertian Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Teknologi informasi adalah suatu yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang relevan dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan

dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang didistribusikan disetiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat digunakan oleh pemimpin daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Disisi lain pihak legislatif dapat menggunakan untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. Berikut adalah Gambaran Umum SIMDA



Gambar 2.1 Tampilan jendela Aplikasi SIMDA keuangan

Sumber : <http://kolut.simda.online>

1. Tujuan dan manfaat SIMDA

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA.
- b) Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan *webcam* bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA.
- c) Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya.
- d) Sebagai media awal bagi pelaksanaan *e-government*.
- e) Sebagai sarana untuk pelaksanaan *good government*.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

- a) Database terpadu tidak perlu diinput berulang-ulang data yang sama.
- b) Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin) dan
- c) Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana, *output* dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku dan *output* dapat diasjikan berdasarkan kebutuhan manajemen

pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

2. Klasifikasi SIMDA

Program SIMDA sendiri terdiri dari beberapa tingkatan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi aplikasi dalam memberikan informasi kepada masing-masing pejabat yang bersangkutan, SIMDA dapat diklasifikasikan menjadi tahapan, yaitu (Suwindra, 2016) :

- a) Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.
- b) Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/lembaga/sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah.
- c) Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/lembaga.

3. Unsur SIMDA

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP, 2008), yaitu sebagai berikut :

- a) Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.

- b) Portal, pelayanan publik, situs *web* pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
- c) Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi, informasi dan dokumen elektronik.
- d) Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

4. Modul SIMDA

Beberapa modul SIMDA adalah sebagai berikut :

- a) SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)
- b) SIMPOTDA (Sistem Informasi Manajemen Potensi Daerah)
- c) SIMARSIP (Sistem Informasi Manajemen Kearsipan)
- d) SIMONJAR (Sistem Informasi Monitoring Jaringan)
- e) SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)
- f) SIMNAKER (Sistem Informasi Manajemen Ketenaga Kerjaan)

- g) SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah)
- h) SIMSAT ONLINE (Sistem Informasi Manajemen Manunggal Satu Atap)
- i) SIMYANDU (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu)
- j) SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
- k) SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)
- l) SIMKES (Sistem Informasi Manajemen Kesehatan)
- m) SISFOHUKUM (Sistem Informasi Produk Hukum)
- n) SISFOLITBANG (Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan)
- o) SISFO-APBD (Sistem Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja)
- p) SISTADIKJAR (Sistem Informasi Statistik Pendidikan)
- q) SISTER (Sistem Informasi Sekolah Terpadu)
- r) SISFODIKJAR (Sistem Informasi Pendidikan dan Pengajaran)
- s) SINERAL (Sistem Informasi Energi dan Mineral)
- t) SIPPER (Sistem Informasi Pertanian dan Peternakan)
- u) SINDAGKOP (Sistem Informasi Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi)
- v) SIMPD (Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah)

- w) SIBUDPAR (Sistem Informasi Kebudayaan dan Pariwisata)
- x) SITENUH (Sistem Informasi Potensi Lingkungan)
- y) SIGUNAHAN Geografis Penggunaan Lahan)
- z) SIMNAHAN (Sistem Informasi Manajemen Penggunaan Lahan)
- aa) SIKIMPRASWIL (Sistem Informasi Pemukiman dan Prasarana Wilayah)
- bb) SIPU (Sistem Informasi Pekerjaan Umum)
- cc) SIPEDAL (Sistem Informasi Dampak Lingkungan)
- dd) SIKUMDANG (Sistem Informasi Hukum dan Perundang-Undangan)
- ee) SIMADA (Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah/GIS/Spatial)
- ff) SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)
- gg) SIKASDA (Sistem Informasi Kas Daerah)
- hh) SISTAPOTWIL (Sistem Informasi Statistik Potensi Wilayah)
- ii) SISDIKLAT (Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai)

2.1.3.5 Hasil pengembangan aplikasi SIMDA adalah sebagai berikut (<http://www.bpkp.go.id>) :

1. Program Aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7.0,6

Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegritas, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. *output* yang dihasilkan aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7.0,6 antara lain :

a) Penganggaran

Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

b) Penatausahaan

Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.

c) Akuntansi dan pelaporan

Jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan keuangan (laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca), Perda, pertanggungjawaban dan penjabarannya.

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA keuangan adalah :

- a) Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban).
- b) Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat.
- c) Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
- d) Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan
- e) Mempermudah proses audit bagi auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi *electronic data processing* (EDP) audit.

2. Program Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.69 dan Versi 2.0.69

Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. *output* aplikasi ini antara lain :

a. Perencanaan

Daftar Kebutuhan Barang Dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.

b. Pengadaan

Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan.

c. Penatausahaan

Kartu Investasi Barang (KIB), Kartu (Sejarah) Barang, Kartu Investasi Ruang (KIR), Buku Investasi (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.

d. Penghapusan

SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang Yang Dihapuskan.

e. Akuntansi

Daftar Barang yang Masuk Neraca (*Intracomptable*), Daftar Barang *Extra Comptable*, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.

5. Program Aplikasi Komputer SIMDA Gaji

Aplikasi komputer SIMDA Gaji dikembangkan berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan penggajian pegawainya. Aplikasi ini membantu Pemda untuk memproses penggajian secara lebih cepat, akurat serta menghasilkan dokumen penggajian yang dapat diandalkan. *Output* dari aplikasi adalah sebagai

- a) Daftar Gaji, Rapel, Gaji Terusan, Perhitungan Pajak.
 - b) Daftar Pegawai
 - c) Register-Register
6. Program Aplikasi Komputer SIMDA Pendapatan Versi 1.2.0.9

Tujuan pengembangan aplikasi ini adalah sebagai sarana optimalisasi pajak/retribusi daerah serta agar pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan-laporan pengelolaan pendapatan dan piutang sebagai dokumen pendukung laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diandalkan. *Output* dari aplikasi antara lain sebagai berikut:

a) Pendapatan

Formulir Pendaftaran, Tanda Terima Pendaftaran, Kartu NPWP/RD, Daftar Wajib Pajak/Retribusi, Daftar SPTP/RD, dan Kartu Data.

b) Penetapan

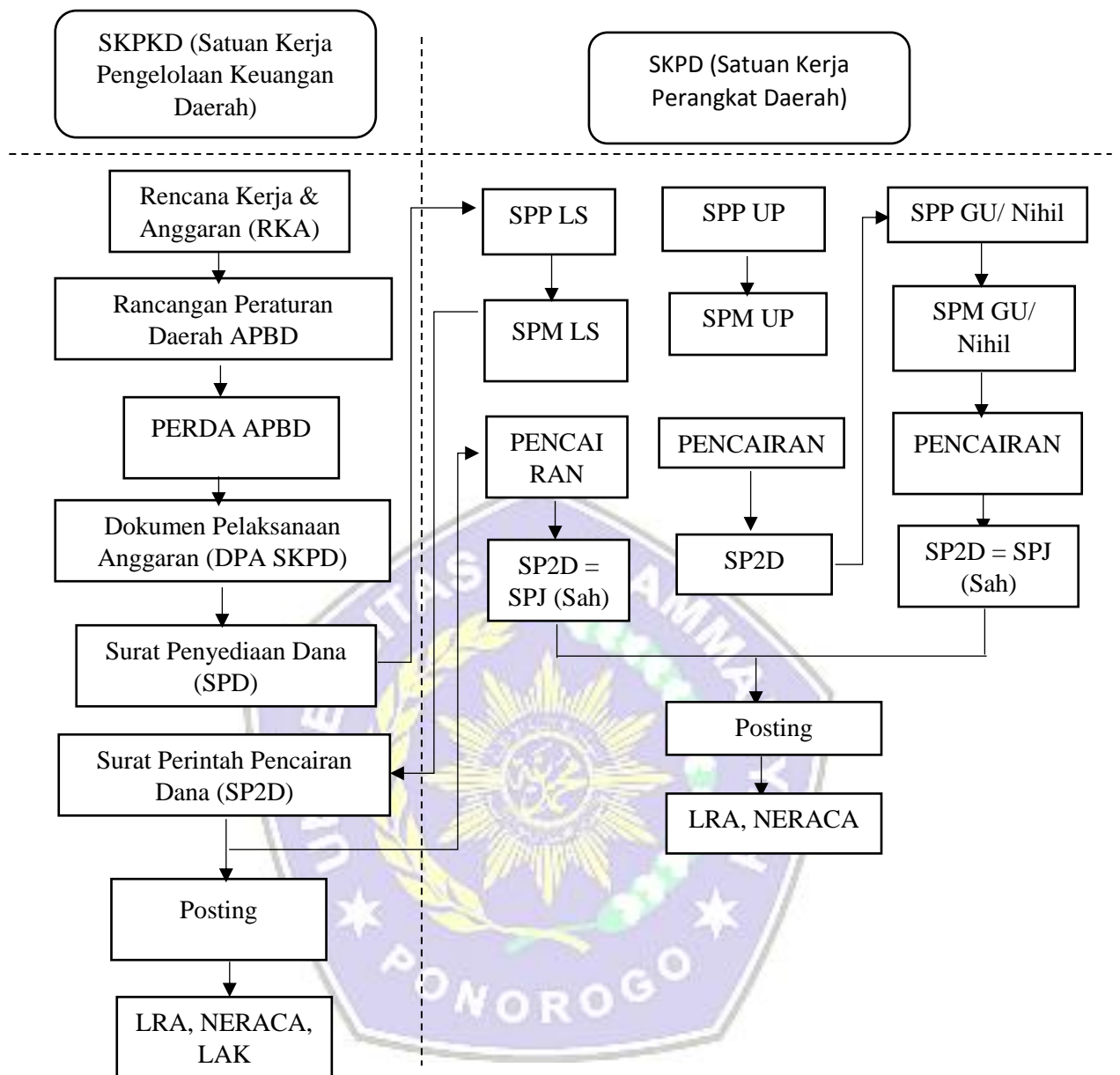
Nota Perhitungan Pajak/Retribusi Daerah, SKP/RD(Surat Keterangan Pajak/Retribusi Daerah), Daftar SPKP/RD Tambahan, SKPD/R Kurang Bayar, SKP/RD Nihil, Daftar Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah, dan Daftar Tunggakan Pajak/Retribusi Daerah.

c) Penatausahaan

Laporan Penerimaan Harian, Laporan Realisasi Penerimaan, Kartu Piutang, Buku Pembantu Rincian Penerimaan per Obyek, STS (Surat Tanda Setoran) dan Buku Kas Umum.

2.1.3.6 Gambaran Umum Aplikasi SIMDA Keuangan

Aplikasi SIMDA keuangan adalah salah satu aplikasi dalam sistem informasi manajemen daerah yang dikembangkan oleh BPK khususnya dalam fungsi pengelolaan keuangan daerah. tahapan pengelolaan keuangan yang dicakup oleh SIMDA keuangan meliputi proses penganggaran, penatausahaan keuangan (penerimaan dan pengeluaran kas) dan akuntansi baik di Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Proses penganggaran dalam aplikasi SIMDA Keuangan meliputi proses penganggaran yang dilaksanakan di SKPKD dan di SKPD. Secara ringkas proses penganggaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Alur Pelaksanaan Anggaran

Proses akuntansi dalam aplikasi SIMDA Keuangan meliputi proses penjurnalan, posting, dan pelaporan di SKPKD dan di SKPD. Proses terintegrasi dengan modul dengan penatausahaan. Pencatatan atas transaksi akuntansi tahun berjalan akan secara otomatis dilakukan program aplikasi pada saat “POSTING” atas pelaksanaan penatausahaan keuangan. Data koreksi/penyesuaian diinput secara manual (Jhon F. Dkk, 2010).

2.1.4. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.4.1. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling penting dalam suatu entitas atau pemerintahan untuk menunjang keberhasilan dalam suatu organisasi. Menurut Sumarsono (2003) sumber daya manusia merupakan manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Menurut Sofyandi (2013) sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, timbulnya kebutuhan akan profesionalisme untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya menunjukkan semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi. Menurut Mardiasmo (2002:146) menyatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat berhemat waktu pembuatan laporan keuangan disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan

memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu.

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah seorang karyawan atau pegawai negeri sipil yang bekerja dalam suatu pemerintahan. Dalam suatu pemerintahan apabila sumber daya manusia berkompeten dan berkualitas, maka dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan disiplin waktu.

2.1.4.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan ditempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati (Andini dkk, 2015). Menurut Spencer & Spencer (1993) kompetensi adalah *an underlying characteristic of individual that is casually related to criterion-referenced effective and/ or superior performance in a job situation*. Spencer & Spencer (1993) menitik beratkan definisi kompetensi pada tiga bagian yaitu *Underlying characteristic*, *casually related*, dan *criterion referenced*. *Underlying characteristic* mempunyai arti bahwa kompetensi terdapat dalam diri seseorang yang telah bertahan lama yang merupakan bagian

dari kepribadian seseorang dan dapat memprediksi tingkahlaku pada ranah situasi yang lebih luas atau pada tugas-tugas dalam pekerjaan. *Casually related* merujuk bahwa kompetensi dapat menyebabkan atau memprediksikan tingkahlaku dan performa. *Criterion related* mempunyai arti bahwa kompetensi dapat memprediksi apa yang akan memenuhi suatu kriteria ataupun standar tertentu.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya yaitu kemampuan seseorang dalam suatu organisasi atau kelembagaan, untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan dalam mencapai suatu tujuan efektif dan efisien (Rahayu dkk, 2014). Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk melakukan pengambilan keputusan. Sementara itu, dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 November 2003 ditentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah sesuatu yang dapat terukur, diobservasi, diprediksi, dan dievaluasi yang terefleksikan dalam perilaku kerja seorang yang

terdiri atas kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*). Kompetensi merupakan faktor penentu bagi seseorang untuk menampilkan kinerja terbaiknya. Pada situasi kolektif di dalam organisasi, kompetensi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan organisasi tersebut dalam menghadapi perubahan yang terjadi (www.bpkp.go.id) . Sedangkan menurut Ihsani (2014) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang dalam suatu organisasi atau sistem untuk melakukan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil, berupa keterampilan dan pengetahuan khusus, sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) (Novi Pratiwi, 2018).

2.1.4.3. Tujuan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Penggunaan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi atau perusahaan menurut Hutapea dan Thoha (2008, h. 16-18) pada umumnya adalah untuk tujuan pembentukan pekerjaan (*job design*), evaluasi pekerjaan (*job*

evaluation), rekrutmen dan seleksi (*recruitment and selection*), pembentukan dan pengembangan organisasi (*organization design and development*), serta membentuk dan memperkuat nilai dan budaya (*company culture*). Berikut ini adalah uraian mengenai tujuan kompetensi :

1. Pembentukan Pekerjaan (*Job Design*)

Kompetensi teknis dapat digunakan untuk menggambarkan fungsi, peran, dan tanggung jawab pekerjaan di suatu organisasi. Besarnya fungsi, peran, dan tanggung jawab tersebut tergantung dari tujuan perusahaan, besar kecilnya perusahaan, dan tingkat pekerjaan yang dilakukan.

2. Evaluasi Pekerjaan (*Job Evaluation*)

Kompetensi dapat dijadikan salah satu faktor pembobot pekerjaan yang digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan serta penentuan atas persyaratan atau kualifikasi orang yang layak melaksanakan pekerjaan serta tantangan pekerjaan merupakan komponen terbesar dalam menentukan bobot suatu pekerjaan.

3. Rekrutmen dan Seleksi (*recruitment and selection*)

Pembentukan organisasi biasanya diikuti dengan pembentukan pekerjaan serta penentuan atas persyaratan atau kualifikasi orang yang layak melaksanakan suatu pekerjaan. Kompetensi dapat dapat digunakan sebagai

salah satu komponen persyaratan jabatan, yang kemudian dijadikan pedoman untuk menyeleksi calon karyawan.

4. Pembentukan dan pengembangan organisasi (*Organization design and development*)

Organisasi yang kukuh adalah organisasi yang mempunyai kerangka fondasi yang kuat. Kekukuhan fondasi ditentukan oleh kemampuan teknis, nilai (*value*) atau budaya organisasi serta semangat kerja (*motivation*) orang-orang yang berkerja dalam organisasi. Semua itu harus didasarkan pada visi dan misi organisasi.

5. Membentuk dan memperkuat nilai dan budaya (*company culture*)

Peran kompetensi perilaku sangat diperlukan untuk membentuk dan mengembangkan nilai budaya suatu perusahaan (*culture*).

2.1.4.4. Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien dan profesional (keputusan Kepala BKN No. 46 Tahun 2007). Menurut

(Sutrisno, 2009, h.204-205) indikator dari kompetensi sumber daya manusia terdiri dari :

1. Pengetahuan

Kesadaran dalam bidang kognif. Karyawan harus mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada diperusahaan.

2. Keterampilan

Keterampilan adalah suatu yang harus dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

3. Sikap

Perasaan (senang tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi terhadap sesuatu yang datang dari luar. Misalnya, krisis ekonomi, kenaikan gaji dll.

2.1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pernah diteliti oleh penelitian terdahulu mengenai pengaruh implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

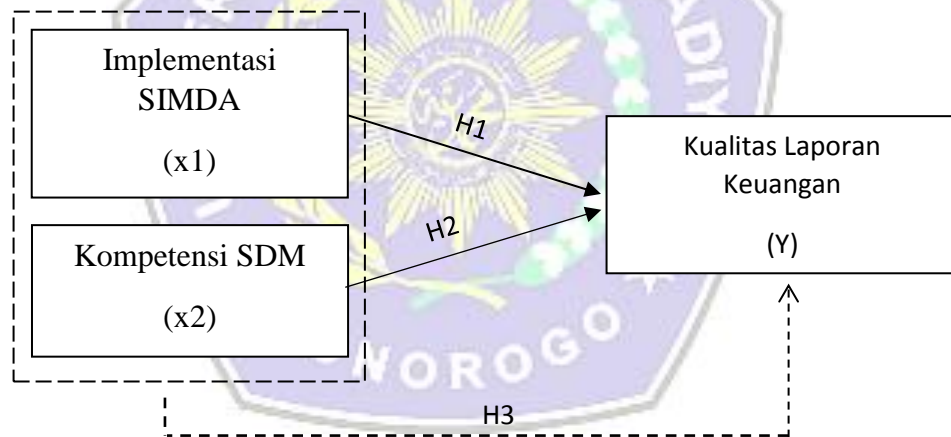
No	Nama Peneliti	Metode	Hasil
1.	Egit Gunadi (2017)	Metode Kuantitatif	Variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa
2.	Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017)	Metode kuantitatif	<p>Variabel kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
3.	Novi Pratiwi (2018)	Metode Kuantitatif	<p>Variabel pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>Variabel kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>Variabel penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>Variabel pengaruh pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
4.	M. Khoirul Abidin, Afifudin dan Junaidi (2018)	Penelitian Kuantitatif	<p>Variabel implementasi sistem manajemen daerah (SIMDA) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang.</p> <p>Variabel kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap</p>

			<p>variabel kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Malang.</p> <p>Variabel standar akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang.</p>
5.	Tri Ikyarti dan Nilla Aprila (2019)	Penelitian Kualitatif	<p>Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>Implementasi sistem informasi manajemen daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p>



2.1.6. Kerangka Pemikiran

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan kompetensi Sumber Daya Manusia diharapkan akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini mencoba untuk mencari pengaruh implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Magetan. Untuk mengetahui keterkaitan hubungan masing-masing variabel maka kerangka pemikiran dapat ditunjukkan dengan pola berikut ini :



Keterangan :

- = Garis Simultan
- = Garis Persial

Gambar 2.3 Kerangka Permikiran

Berdasarkan gambar 2.2 diatas dapat terlihat bahwa penilitian ini berusaha akan menjelaskan hubungan antara dua variabel indepeden (bebas) dengan satu variabel dependen (terikat). Variabel indepeden yang

pertama adalah implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dilihat dari hubungannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah yaitu dengan mengimplementasikan SIMDA sebagai teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah, maka kualitas laporan keuangan suatu pemerintahan daerah akan membaik.

Variabel independen yang kedua yaitu kompetensi sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menyusun suatu laporan keuangan dan melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dapat membuat laporan keuangan yang baik, handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.7. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatan sementara karena jawaban yang diebrikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2014, h.64).

1. Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

PP. Nomor 56 Tahun 2005 menjelaskan bahwa untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan

teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah serta menyalurkan informasi kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yaitu SIMDA terhadap Kualitas Laporan keuangan mengandung arti yaitu sebagai proses pengumpulan, pengelolaan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja suatu organisasi khususnya pemerintahan. Dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan mewujudkan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian yang dilakukan Egit Gunadi (2017), yang berjudul pengaruh penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa). Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan dari uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah

(SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan dari penelitian terdahulu maka hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H0₁ : Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Magetan.

Ha₁ : Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Magetan.

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kabupaten Magetan.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang dalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk melakukan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Ihsanti, 2014). Apabila suatu pemerintahan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam memahami cara membuat laporan keuangan dengan baik dan benar, maka suatu kualitas laporan keuangan pemerintah akan semakin membaik.

Penelitian yang dilakukan Novi Pratiwi (2018) dengan judul pengaruh pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Wonogiri). Menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Sukmaningrum, (2012) dengan hasil kompetensi sumber daya manusia yang diproksikan dengan pemahaman staf, interaksi antara sumber daya manusia dengan sistem, kontrol terhadap sumber daya manusia, dan pendidikan serta training tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan dari penelitian terdahulu maka hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H0₂ :Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Magetan.

Ha₂ :Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Magetan.

3. Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Implementasi sistem informasi manajemen daerah merupakan suatu komponen pemerintahan yang sangat penting untuk mempermudah dalam mengelola keuangan dan pelaporan keuangan.

Penerapan sistem informasi daerah (SIMDA) mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu teknologi informasi atau sistem informasi juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya. Kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu entitas atau suatu pemerintahan untuk merencanakan dan mengendalikan suatu entitas yang bersangkutan. Sumber daya manusia yang berkompeten juga diperlukan untuk dalam penyusunan suatu laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian diatas diduga terdapat hubungan positif antara implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah, maka hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H0₃ :Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Ha₃ :Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.